

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Kebijakan penanganan stunting di Desa Tamansari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal masih terus berproses, artinya permasalahan terkait koordinasi, pendanaan dan partisipasi dari aparat pemerintah desa maupun stakeholders terkait lainnya masih menjadi permasalahan utama. Pemerintah Desa Tamansari baru mengakomodir kebijakan penanganan stunting dalam dokumen APBDes-nya setelah ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa Tamansari Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembentukan TPPS Tamansari. Intervensi gizi pada ibu dan bayi pada kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, bayi baru lahir dan balita pada dasarnya sudah lama dilaksanakan sebelumnya, meski dengan dukungan anggaran yang terbatas dengan memanfaatkan fasilitas posyandu yang dikordinasikan oleh bidan desa dengan dibantu kader posyandu maupun penyuluh KB. Namun intervensi tersebut bukanlah dalam rangka penanganan stunting, tetapi lebih pada aktivitas pelayanan kesehatan reguler biasa. Adanya kebijakan terbaru dari kepala desa tersebut tentunya semakin menguatkan legitimasi kewenangan atau pemberian arah penanganan stunting di Desa Tamansari sepanjang didukung oleh stakeholders terkait di dalamnya agar pendanaan maupun intervensinya bisa tepat sasaran.
2. Intervensi gizi sensitif belum ditemukan adanya koordinasi antara pemdes, BPD, Puskesmas, kecamatan, organisasi kemasyarakatan dan pendamping desa, sehingga program dan kegiatan yang ada saat ini berjalan masing-masing dengan sasaran yang berbeda pula. Dengan demikian, peran Camat, kepala desa, BPD,

Fatayat NU, bidan desa, kader kesehatan Posyandu, penyuluh KB hingga pendamping desa pada penanganan stunting di bulan Juni-Juli 2022 dirasakan belum optimal.

3. Faktor pendukung dari penanganan stunting di Desa Tamansari, Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal antara lain tingkat perekonomian kelompok sasaran bukan termasuk keluarga miskin, sehingga kebutuhan asupan gizi anak dan ibu bisa dicukupi secara mandiri. Tinggal bagaimana memberikan pemahaman atau pengarahan terkait pencegahan dan penanganan stunting ini. Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan penurunan stunting di Desa Tamansari ini adalah pemahaman dari perangkat desa dan BPD serta dan tingkat kesadaran kelompok sasaran terkait stunting yang belum memadai.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting di Desa Tamansari, Kecamatan Jatinegara ini maka implikasi yang dapat diberikan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan dan penanganan untuk menurunkan angka stunting di Desa Tamansari ini merupakan proses yang berkesinambungan, sehingga perlu ada upaya pembinaan terus menerus dari stakeholders yang terlibat langsung maupun tidak langsung seperti Puskesmas dan kecamatan untuk memastikan tercukupinya anggaran penanganan stunting dan memastikan koordinasinya antar implementor berjalan baik. Tentunya diperlukan pula peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari perangkat desa dalam upayanya menangani stunting. Sehingga di sini diperlu komunikasi yang lebih intens dengan bidan

desa, petugas penyuluh KB dan organisasi Fatayat untuk saling berbagi ilmu, data, dan pengalaman, serta membangun sikap saling terbuka sehingga pelaksanaannya di tingkat lapangan seperti oleh kader posyandu, penyuluh KB dan anggota Fatayat bisa menjalankan peran dan fungsinya secara baik. Pelaporan kinerja gizi yang diinput secara elektronik melalui aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPBBGM) hendaknya bisa dilakukan oleh kader yang ditunjuk dan dilatih di masing-masing posyandu serta melaporkan hasilnya secara berjenjang dari di tingkat desa dan kecamatan. Tentunya pemerintah desa harus bisa menambah alokasi bantuan dana operasional kegiatan posyandu untuk pembelian perangkat ponsel pintar dan pulsanya.

2. Secara teknis, SK Kades Tamansari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan TPPS Tamansari masih perlu disosialisasikan agar masing-masing anggota dalam tim tersebut bisa memahami tugasnya dengan baik. Selain menambahkan rencana pencapaian target (angka) penurunan stunting dan waktu pencapaiannya agar bisa berfungsi sebagai panduan pelaksanaan secara terukur, sekaligus pula perlu ditambahkan elemen keanggotaan dari organisasi kemasyarakatan dan satuan lembaga pendidikan PAUD/TK.
3. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD lewat berbagai kegiatan seperti pelatihan dan rembuk stunting yang akan memperkuat komitmen dan keberpihakan aparatur pemerintahan desa dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa dengan lebih memperhatikan penanganan balita stunting di tingkat desa, sehingga proses implementasi kebijakannya bisa berjalan efektif sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

4. Pemahaman mengenai stunting ini tidak hanya difokuskan pada tataran aktor pembuat kebijakan, tapi sosialisasi pada tataran tokoh masyarakat dan pelaksana kebijakan juga sangat diperlukan sebagai ujung tombaknya. Sehingga diseminasi informasi tentang penanganan stunting ini dapat diterima dengan baik di masyarakat.
5. Peneliti periode selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian serupa dengan mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan penanganan stunting.

